



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CUT AHMAD PUTRA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 999955

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.881.440.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/204 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.872.600.000
2. Tanah Seluas 20.610 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 618.300.000
3. Tanah Seluas 8.380 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 251.140.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.071.000.000
6. Tanah Seluas 1.255 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 753.000.000
7. Tanah Seluas 718 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 215.400.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **164.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



2. MOBIL, HONDA MOBILIO MINI BUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 145.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 365.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.448.037

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.412.188.037

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.412.188.037

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.